

Komunikasi Politik Perempuan di Maluku: Antara Peluang, Tantangan, dan Dinamika Sosial-Budaya

by Afdhal Afdhal

Submission date: 18-Oct-2024 02:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2489078040

File name: Afdhal_Artikel.docx (54.13K)

Word count: 5557

Character count: 37397

Komunikasi Politik Perempuan di Maluku: Antara Peluang, Tantangan, dan Dinamika Sosial-Budaya

Afdhal^{1*}

¹Universitas Pattimura, Indonesia
[*afdhal@lecturer.unpatti.ac.id](mailto:afdhal@lecturer.unpatti.ac.id)¹

Alamat: Jln. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku
Korespondensi penulis: afdhal@lecturer.unpatti.ac.id

Abstract. This study examines women's political communication in Maluku, focusing on the opportunities, challenges, and socio-cultural dynamics they face. In a region strongly influenced by patriarchal culture, women's roles in politics are often constrained by traditional social norms and resistance to their involvement in a male-dominated political arena. The complexity of this issue is heightened by the perception that politics is a harsh and competitive domain. The aim of this research is to understand the communication strategies used by female politicians in Maluku and to identify the factors that influence their success or failure in the political field. This study employs a qualitative method, gathering data through in-depth interviews with female politicians, activists, and political observers in Maluku. The findings reveal that despite significant challenges, female politicians are able to leverage local values such as community solidarity and the adat-based social system to strengthen their political positions. Additionally, social networks and support from women's groups and political organizations play crucial roles in their political communication strategies. Women's roles in Maluku politics are not limited to verbal and non-verbal communication but also include their ability to integrate local values and utilize their central societal roles to promote political agendas. These findings provide a significant contribution to the study of women's political communication, particularly in contexts that have been underexplored in both national and international literature. The research concludes that women's political communication in Maluku is a complex adaptation to the local socio-cultural context.

Keywords: Political Communication, Female Politicians, Patriarchal Culture, Local Values, Social Networks.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji komunikasi politik perempuan di Maluku dalam konteks peluang, tantangan, dan dinamika sosial-budaya. Di wilayah yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, peran perempuan dalam politik seringkali dibatasi oleh pandangan sosial tradisional dan resistensi terhadap keterlibatan mereka di arena politik yang dianggap maskulin. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena politik masih dilihat sebagai domain yang keras dan kompetitif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami strategi komunikasi yang digunakan oleh perempuan politisi di Maluku serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap perempuan politisi, aktivis, dan pengamat politik di Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan politisi menghadapi tantangan signifikan, mereka mampu memanfaatkan nilai-nilai lokal seperti solidaritas komunitas dan sistem sosial berbasis adat untuk memperkuat posisi politik mereka. Selain itu, jaringan sosial dan dukungan dari kelompok perempuan serta organisasi politik menjadi faktor penting dalam strategi komunikasi politik mereka. Tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal dan non-verbal, peran perempuan dalam politik di Maluku juga mencakup kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan memanfaatkan posisi sentral mereka dalam masyarakat untuk mempromosikan agenda politik. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian komunikasi politik perempuan, khususnya di wilayah yang kurang terekspos dalam literatur nasional dan internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik perempuan di Maluku adalah bentuk adaptasi yang kompleks terhadap konteks sosial-budaya setempat.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Politisi Perempuan, Budaya Patriarki, Nilai-Nilai Lokal, Jaringan Sosial

1. LATAR BELAKANG

³⁷ Peran perempuan dalam politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, namun di beberapa daerah, termasuk Maluku, tantangan yang dihadapi perempuan politisi masih sangat kompleks (Afdhal, 2023; Ramdhan & Afdhal, 2023). Di wilayah yang kental dengan budaya patriarki, perempuan sering kali dihadapkan pada pandangan tradisional yang menempatkan mereka sebagai subordinat dalam struktur sosial (Mayrudin et al., 2022). Hal ini tercermin dalam minimnya representasi perempuan di ranah politik formal, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, yang menunjukkan bahwa keterlibatan mereka masih dianggap sebagai anomali. Terlebih lagi, komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan sering kali dihadapkan pada resistensi dan stigma sosial yang menghambat efektivitasnya (Tondang et al., 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perempuan di Maluku menavigasi dunia politik yang keras, di mana peran sosial mereka terikat dengan norma-norma adat yang secara historis membatasi ruang gerak perempuan. Fakta menunjukkan bahwa, meskipun terdapat berbagai inisiatif nasional untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, perempuan politisi di Maluku tetap menghadapi tantangan yang unik dan belum banyak diungkap dalam kajian akademik (Tondang et al., 2023; Wahyudi, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk ³⁸ dilakukan, tidak hanya untuk mengungkap tantangan yang dihadapi, tetapi juga untuk mengeksplorasi strategi komunikasi politik yang digunakan oleh perempuan dalam upaya mereka memperjuangkan posisi politik di tengah-tengah sistem sosial yang cenderung maskulin.

Kajian mengenai komunikasi politik perempuan terus berkembang dalam dua dekade terakhir, terutama dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik (Nazrul, 2024; Prillaman, 2023). Di Indonesia, penelitian tentang komunikasi politik perempuan cenderung berfokus pada hambatan struktural dan sosial yang dihadapi perempuan politisi. Farkas & Bene, (2021) dan Klinger & Svensson (2023) menekankan bahwa perempuan sering kali kesulitan dalam memanfaatkan media massa sebagai alat komunikasi politik karena dominasi laki-laki dalam dunia media. Studi ini menemukan bahwa perempuan politisi kerap dirugikan dalam pemberitaan media, yang lebih menyoroti aspek-aspek pribadi daripada kapabilitas politik mereka.

Selanjutnya, Krasniqi (2021) menggarisbawahi tantangan lain, yaitu resistensi budaya patriarki yang mempersempit ruang gerak perempuan di dunia politik. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi politik perempuan di wilayah pedesaan Indonesia lebih sulit berkembang dibandingkan dengan wilayah perkotaan, mengingat adanya norma tradisional yang masih sangat kuat. Ini sejalan dengan temuan Cárdenas & Hedström (2021), yang menunjukkan bahwa perempuan di wilayah timur Indonesia menghadapi hambatan ganda: mereka tidak hanya berhadapan dengan tantangan gender, tetapi juga isolasi geografis dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik.

Knott & Kostovicova (2024) dan Muñoz-Puig (2024) juga menambahkan dimensi penting terkait keterbatasan perempuan dalam membangun jaringan politik yang luas. Keduanya menyoroti bahwa perempuan politisi di daerah-daerah dengan tradisi patriarki yang kuat, termasuk Maluku, lebih sulit membangun jaringan politik yang efektif karena kurangnya akses ke lingkaran kekuasaan yang didominasi laki-laki. Dalam konteks ini, perempuan di Maluku menghadapi tantangan yang berbeda dari rekan-rekan mereka di wilayah lain. Norma adat, seperti patron-client dan hierarchical kinship, memberikan batasan-batasan tersendiri yang memengaruhi cara perempuan berpolitik.

Meski begitu, beberapa penelitian mulai menunjukkan adanya kebangkitan peran perempuan di bidang politik di wilayah timur Indonesia. Ramdhan & Afdhal (2023) dan Afdhal (2023) misalnya, mengungkap bahwa organisasi perempuan berbasis adat mulai memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Meskipun masih terbatas, keberadaan organisasi ini menjadi jaringan sosial yang dapat diandalkan oleh perempuan politisi dalam menavigasi dunia politik.

Namun, dari tinjauan literatur yang ada, terlihat bahwa kajian komunikasi politik perempuan di Maluku masih minim. Bahkan, kajian-kajian sebelumnya sering kali hanya menyentuh aspek tantangan struktural dan sosial, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap bagaimana perempuan memanfaatkan nilai-nilai lokal, seperti *pela* dan *gandong*, untuk memperkuat komunikasi politik mereka. Studi yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami dimensi ini, khususnya dalam konteks Maluku yang memiliki dinamika sosial-budaya tersendiri.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa dimensi. *Pertama*, penelitian ini secara spesifik meneliti bagaimana perempuan politisi di Maluku mengembangkan

komunikasi politik yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal. Tidak seperti studi-studi sebelumnya yang lebih berfokus pada hambatan yang dihadapi perempuan dalam komunikasi politik, penelitian ini menyoroti strategi adaptasi dan inovasi yang mereka lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. *Kedua*, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai penggunaan modal sosial berbasis adat oleh perempuan politisi. Nilai-nilai lokal seperti *pela* dan *gandong* jarang diungkap sebagai alat politik dalam studi-studi sebelumnya. Dalam konteks ini, penelitian ini menunjukkan bagaimana perempuan menggunakan hubungan kekeluargaan dan solidaritas komunitas sebagai modal sosial untuk membangun legitimasi politik mereka. Ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengabaikan peran budaya lokal sebagai bagian dari komunikasi politik perempuan. *Ketiga*, penelitian ini memposisikan perempuan politisi sebagai agen perubahan, bukan hanya korban dari struktur patriarki. Dalam banyak literatur, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang pasif, seolah-olah hanya menjadi objek dari hambatan-hambatan politik. Sebaliknya, penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan aktif membangun strategi dan menggunakan sumber daya lokal untuk menghadapi tantangan, yang memberikan pemahaman baru tentang peran perempuan dalam politik di wilayah dengan budaya patriarki yang kuat.

2. KAJIAN TEORITIS

Terdapat beberapa teori kunci yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori komunikasi politik, gender, dan modal sosial. Teori-teori ini relevan digunakan untuk memahami dinamika komunikasi politik perempuan di Maluku. Selain itu, teori ini juga membantu dalam mengontekstualisasikan tantangan serta strategi komunikasi politik yang diadopsi oleh politisi perempuan di wilayah yang sarat dengan norma patriarki yang kuat.

Teori Komunikasi Politik

Komunikasi politik merujuk pada proses pertukaran informasi, pesan, dan simbol yang terjadi dalam konteks politik (McNair, 2011). Teori ini menyoroti bagaimana aktor politik, termasuk politisi perempuan, menggunakan media dan interaksi sosial untuk memengaruhi opini publik, membangun citra, dan memperoleh dukungan. Dalam konteks penelitian ini, teori komunikasi politik digunakan untuk memahami strategi yang digunakan perempuan politisi di Maluku dalam menyampaikan pesan politik mereka,

baik secara verbal maupun non-verbal, di lingkungan yang didominasi oleh struktur patriarki.

Menurut Denton & Woodward (2014), komunikasi politik tidak hanya mencakup keterampilan berbicara atau presentasi, tetapi juga strategi dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat, terutama di tingkat lokal. Dalam konteks Maluku, perempuan politisi harus mampu bernegosiasi dengan norma-norma adat, yang sering kali membatasi keterlibatan mereka dalam ruang publik, termasuk politik. Oleh karena itu, komunikasi politik perempuan di Maluku tidak hanya dilihat sebagai upaya menyampaikan pesan kepada khalayak, tetapi juga sebagai proses adaptasi yang kompleks terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku.

Teori Gender dan Politik

Teori gender dalam politik banyak berfokus pada bagaimana relasi kekuasaan gender mempengaruhi partisipasi politik (Connell, 1987). Connell memperkenalkan konsep “hegemonic masculinity”, yaitu suatu bentuk dominasi laki-laki yang memperkuat peran subordinat perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks politik, hal ini mempengaruhi bagaimana perempuan dipersepsikan dan diharapkan berperilaku. Di wilayah seperti Maluku, norma-norma patriarki cenderung mengukuhkan maskulinitas hegemonik, yang membatasi ruang gerak perempuan dalam arena politik. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu tunduk pada norma-norma ini. Misalnya, studi oleh Krook & Norris (2014) tentang partisipasi politik perempuan mengungkap bahwa perempuan sering kali membangun strategi adaptasi dan resistensi untuk mengatasi kendala yang ada. Dalam konteks penelitian ini, perempuan politisi di Maluku mungkin mengadopsi strategi-strategi yang menantang norma patriarki sambil tetap menghormati nilai-nilai lokal untuk mencapai legitimasi politik.

Selain itu, teori *gendered mediation* (Ross & Carter, 2011) relevan dalam memahami bagaimana media dan publik memandang perempuan politisi. Dalam teori ini, media cenderung memperlakukan perempuan politisi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki politisi, sering kali lebih fokus pada aspek pribadi dan gender mereka daripada kemampuan politiknya. Hal ini menjadi relevan dalam memahami tantangan perempuan politisi di Maluku yang mungkin mengalami bias gender dalam representasi publik dan komunikasi politik mereka.

Teori Modal Sosial

Teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (1993) dan Woolcock (1998) sangat relevan dalam memahami bagaimana perempuan politisi di Maluku membangun jaringan sosial untuk memperkuat posisi politik mereka. Modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan individu atau kelompok untuk bekerja sama secara lebih efektif. Dalam konteks politik, modal sosial dapat membantu perempuan politisi untuk memperoleh dukungan dari komunitas dan memanfaatkan jaringan yang ada untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem politik yang didominasi laki-laki.

Dalam penelitian ini, nilai-nilai lokal seperti *pela* dan *gandong* di Maluku berfungsi sebagai bentuk modal sosial yang unik. Hubungan kekeluargaan yang kuat dan solidaritas antar-komunitas yang dipertahankan melalui adat istiadat menjadi sumber kekuatan perempuan politisi. Mereka menggunakan hubungan sosial yang terjalin melalui sistem adat ini untuk memperoleh dukungan politik yang lebih luas dan membangun legitimasi dalam komunitas mereka. Studi Woolcock (1998) menunjukkan bahwa modal sosial sering kali menjadi sumber daya penting bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan, dalam memperluas pengaruh politik mereka.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika komunikasi politik perempuan di Maluku. Pendekatan ini dirancang untuk memahami fenomena komunikasi politik yang kompleks dalam konteks sosial-budaya yang unik, terutama di wilayah yang masih kental dengan norma patriarki. Studi kasus memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan politisi menavigasi tantangan sosial dan budaya yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka memanfaatkan jaringan sosial serta nilai-nilai lokal seperti *pela* dan *gandong* dalam mengartikulasikan peran mereka dalam politik (Yin, 2014).

Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah di Maluku, dengan fokus utama pada kota Ambon dan beberapa wilayah adat sekitarnya. Kota Ambon dipilih karena merupakan pusat kegiatan politik di Maluku, sedangkan wilayah adat sekitarnya

memberikan konteks lokal yang berbeda dalam memahami tantangan politik perempuan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan peran strategis perempuan dalam komunitas lokal serta interaksi mereka dengan struktur politik yang dominan.

Informan penelitian terdiri dari perempuan politisi yang memiliki pengalaman minimal lima tahun dalam politik lokal, baik di parlemen maupun sebagai aktivis, serta tokoh masyarakat dan pemimpin adat yang relevan. Teknik purposive sampling diterapkan untuk memastikan bahwa informan memiliki pengalaman yang cukup mendalam dalam menghadapi tantangan politik dan sosial. Dengan memilih 15-20 informan yang sesuai, diharapkan data yang diperoleh mencerminkan keragaman pengalaman komunikasi politik perempuan di Maluku (Patton, 2002).

²¹ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memberikan ⁴⁹ peluang bagi informan untuk berbagi ⁴⁹ pandangan dan pengalaman pribadi terkait tantangan dan strategi komunikasi yang mereka gunakan dalam politik. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur untuk menjaga fokus pada topik penelitian namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengeksplorasi pengalaman mereka secara bebas (Moleong, 2021). Sementara itu, observasi partisipatif dilakukan dalam kegiatan politik dan sosial lokal untuk memahami secara langsung dinamika komunikasi politik di lapangan. Di sisi lain, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen kebijakan, berita lokal, dan rekaman sidang yang terkait dengan perempuan politisi untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

Data yang diperoleh ²⁶ dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang memungkinkan identifikasi ⁴⁶ tema-tema utama yang muncul dari data secara sistematis. Tema-tema ini mencakup strategi komunikasi, tantangan budaya patriarki, dan peran modal sosial dalam mendukung keberhasilan politik perempuan. Teknik analisis ini dipilih karena kemampuannya untuk menangkap kompleksitas interaksi sosial dan politik yang menjadi fokus penelitian (Braun & Clarke, 2016). Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, teknik triangulasi digunakan. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan satu sama lain untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh. Triangulasi ini penting untuk mengurangi bias dan memberikan ⁴⁶ gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Denzin & Lincoln,

2018). Semua proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian sosial, termasuk persetujuan informan dan menjaga kerahasiaan identitas mereka untuk menghindari dampak negatif terhadap karier politik mereka (Flick, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Berbasis Nilai Lokal sebagai Kekuatan Strategis

Temuan pertama dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan politisi di Maluku mengembangkan strategi komunikasi politik yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat lokal seperti *pela* dan *gandong*. Berdasarkan wawancara mendalam dengan para informan, nilai-nilai tersebut memainkan peran sentral dalam membentuk cara perempuan berinteraksi dengan konstituen mereka. *Pela* dan *gandong*, yang menekankan persaudaraan, solidaritas, dan kerjasama lintas komunitas, memberikan kerangka sosial bagi perempuan politisi untuk membangun jaringan sosial yang kuat dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk kelompok adat dan komunitas masyarakat lokal. Seorang informan menyebutkan “Di Maluku, kalau kita hanya bicara soal kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sulit untuk diterima. Perempuan harus bisa menunjukkan bahwa mereka mewakili lebih dari itu, bahwa mereka berjuang atas dasar hubungan yang lebih besar seperti *gandong*. Itulah yang membuat dukungan menjadi solid.”

Informan ini menggambarkan bagaimana kekuatan jaringan sosial yang terbangun melalui hubungan kekerabatan adat membuat perempuan politisi memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya politik dan dukungan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan politik dan sosial yang muncul dari dinamika patriarki yang masih kental di wilayah tersebut.

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh perempuan politisi di Maluku juga memiliki ciri khas tersendiri. Mereka cenderung mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih kolaboratif dan inklusif, berbeda dari pendekatan maskulin yang lebih konfrontatif. Dalam berbagai forum politik lokal, perempuan politisi lebih memilih untuk memfasilitasi dialog, menciptakan ruang konsensus, dan mengedepankan harmoni dalam pengambilan keputusan. Observasi dari beberapa pertemuan politik menunjukkan bahwa perempuan politisi cenderung mencari solusi yang menjaga hubungan sosial tetap stabil dan menghindari konflik terbuka yang berpotensi merusak solidaritas komunitas.

Seorang informan lain menjelaskan bahwa “Sebagai perempuan, kita lebih sering menggunakan pendekatan yang merangkul, mencari titik tengah dalam perdebatan politik. Bagi kami, menjaga hubungan baik dengan semua pihak adalah yang utama. Berbeda dengan laki-laki yang mungkin lebih sering bersikap agresif atau konfrontatif.”

Pendekatan yang mengutamakan dialog ini tidak hanya membuat mereka lebih diterima di komunitas yang mereka wakili, tetapi juga membangun citra sebagai politisi yang peduli dan peka terhadap kepentingan bersama. Hal ini secara langsung mempengaruhi popularitas mereka di kalangan konstituen, yang lebih mengapresiasi sikap kolaboratif dan harmoni sosial.

Temuan ini mencerminkan teori komunikasi politik yang menekankan bahwa bentuk dan strategi komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial di mana aktor politik beroperasi. Menurut Norris (2011), komunikasi politik tidak hanya tentang transfer pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan jaringan hubungan yang ada di masyarakat. Dalam konteks Maluku, nilai-nilai adat seperti *pela* dan *gandong* bukan hanya elemen budaya, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik.

Nilai-nilai adat ini tidak hanya membentuk identitas perempuan politisi, tetapi juga memberi mereka kekuatan strategis yang unik. Dengan memanfaatkan nilai persaudaraan dan jaringan kekerabatan, perempuan politisi mampu menavigasi dunia politik yang sering dianggap keras dan maskulin. Hal ini berbeda dengan pendekatan komunikasi politik yang lebih banyak didokumentasikan dalam literatur sebelumnya, yang menggambarkan perempuan politisi sebagai aktor yang menghadapi tantangan besar dalam menembus ranah politik yang konfrontatif dan sering kali terdiskriminasi (Basu, 2020; Sapiro, 2019). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa di Maluku, perempuan politisi mampu mengubah hambatan tersebut menjadi peluang melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis nilai-nilai sosial yang kuat.

Pendekatan ini juga dapat dianalisis melalui lensa teori modal sosial dari Pierre Bourdieu. Bourdieu (1990) menekankan bahwa modal sosial tidak hanya terdiri dari jaringan hubungan sosial yang dimiliki seseorang, tetapi juga akses ke sumber daya dan kekuasaan yang dimediasi oleh hubungan tersebut. Dalam kasus perempuan politisi di Maluku, jaringan adat seperti *pela* dan *gandong* menjadi sumber modal sosial yang

memungkinkan mereka untuk mengakses dukungan politik, baik secara moral maupun materiil. Modal sosial ini berfungsi sebagai alat yang memungkinkan mereka untuk bernegosiasi lebih efektif dalam konteks politik yang didominasi oleh laki-laki.

Selain itu, temuan ini juga mendukung argumen Putnam (1993) mengenai pentingnya modal sosial dalam memperkuat kohesi sosial dan efektivitas politik. Melalui modal sosial yang terbentuk dari nilai-nilai adat, perempuan politisi di Maluku mampu memperkuat dukungan konstituen dan membangun kepercayaan yang mendalam dengan komunitas mereka. Ini menjadi elemen penting dalam kesuksesan politik mereka, karena dukungan komunitas lokal adalah salah satu pilar utama keberhasilan politik di wilayah ini.

Adaptasi Budaya Patriarki: Perubahan Sosial yang Lambat namun Signifikan

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa budaya patriarki masih menjadi tantangan utama bagi perempuan politisi di Maluku. Sebagian besar informan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka sering kali menghadapi resistensi yang signifikan dari tokoh-tokoh politik laki-laki. Resistensi ini tidak hanya terbatas pada wacana publik atau kampanye politik, tetapi juga muncul dalam ruang-ruang pengambilan keputusan yang lebih tertutup, seperti parlemen dan pertemuan partai politik. Seorang informan menyebutkan “Di parlemen, sering kali pendapat saya tidak didengar secara serius. Saya merasa lebih dianggap sebagai pelengkap, sementara keputusan besar biasanya diambil oleh laki-laki. Ini membuat kami sulit untuk berperan secara aktif, terutama dalam isu-isu strategis.”

Pernyataan ini menggambarkan pengalaman perempuan politisi yang sering kali dimarginalisasi dalam pengambilan keputusan politik. Budaya patriarki yang mengakar di masyarakat Maluku memperkuat pandangan bahwa perempuan seharusnya memainkan peran pelengkap, bukan sebagai pemimpin utama dalam politik. Resistensi ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga struktural, mengingat norma-norma sosial yang masih kental dengan peran gender tradisional.

Data observasi dari kampanye politik di Maluku memperlihatkan bahwa perempuan politisi sering dianggap lebih cocok menangani isu-isu yang secara tradisional dianggap “feminin,” seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam berbagai

kampanye, mereka sering difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah sosial, sementara isu-isu ekonomi dan keamanan, yang dianggap lebih “maskulin,” biasanya didominasi oleh politisi laki-laki. Hal ini mencerminkan stereotip gender yang masih mendalam dalam persepsi masyarakat. Salah satu informan mengungkapkan “Dalam kampanye, masyarakat biasanya menganggap saya lebih tahu soal pendidikan atau kesejahteraan anak. Kalau soal ekonomi atau keamanan, mereka lebih cenderung mendengarkan laki-laki. Ini membuat kami sulit untuk diakui sebagai pemimpin yang dapat menangani berbagai isu penting.”

Pandangan masyarakat yang demikian menjadi hambatan struktural bagi perempuan politisi untuk membangun legitimasi dan otoritas dalam politik yang lebih luas. Temuan mengenai tantangan budaya patriarki ini konsisten dengan literatur yang telah ada, yang menunjukkan bahwa budaya patriarki merupakan salah satu penghalang utama bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dan diakui sebagai aktor politik yang sah (Basu, 2020; Sapiro, 2019). Patriarki menciptakan struktur sosial yang menempatkan perempuan di posisi subordinat, sehingga menghambat mereka dalam proses pengambilan keputusan dan membatasi peran mereka dalam ranah politik formal. Di Maluku, budaya patriarki ini tidak hanya dipengaruhi oleh konteks nasional, tetapi juga diperkuat oleh nilai-nilai adat tertentu yang masih memosisikan perempuan sebagai sosok pendukung dalam masyarakat.

Namun, yang menarik dari temuan ini adalah adanya dinamika adaptasi dalam budaya patriarki di Maluku. Meskipun patriarki masih menjadi penghalang, perempuan politisi di Maluku mulai memanfaatkan nilai-nilai adat yang progresif seperti *gandong* untuk mendobrak norma-norma tradisional. *Gandong* menekankan prinsip persaudaraan dan kesetaraan, yang memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih berperan dalam ranah publik. Ini terlihat dalam beberapa kampanye dan pertemuan politik di mana perempuan politisi menggunakan retorika berbasis adat untuk mengartikulasikan posisi mereka sebagai pemimpin. Salah satu informan mengatakan “Saya selalu menekankan nilai *gandong* saat berbicara dengan masyarakat. Nilai ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mengingatkan bahwa kita semua setara dalam mengambil keputusan, termasuk dalam politik.”

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perempuan politisi di Maluku tidak hanya berperan sebagai penerima pasif budaya patriarki, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif, dengan menggunakan elemen budaya untuk merestrukturisasi peran mereka dalam politik. Ini mengacu pada teori Anthony Giddens tentang structuration, di mana aktor sosial memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam membentuk dan mengubah struktur sosial yang ada (Giddens, 2008; Giddens & Sutton, 2021). Dalam konteks ini, perempuan politisi di Maluku menggunakan nilai adat sebagai sumber modal sosial untuk menavigasi dan bahkan menantang patriarki yang mendominasi.

Teori modal sosial yang diajukan oleh Pierre Bourdieu juga relevan untuk memahami bagaimana perempuan politisi di Maluku memanfaatkan nilai-nilai adat seperti *gandong*. Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa modal sosial terdiri dari jaringan sosial dan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk mendapatkan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik. Dalam kasus ini, perempuan politisi menggunakan jaringan sosial yang terbentuk melalui hubungan adat untuk memperluas pengaruh mereka dan mendapatkan legitimasi di tengah masyarakat patriarkal. Dengan demikian, mereka mampu melampaui hambatan struktural yang ditetapkan oleh patriarki melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

Perubahan dalam pola komunikasi politik perempuan di Maluku mengisyaratkan bahwa budaya patriarki mengalami proses adaptasi yang lambat tetapi signifikan. ⁴² **Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa**, meskipun resistensi dari tokoh-tokoh politik laki-laki masih kuat, perempuan politisi mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas melalui pendekatan berbasis adat dan kolaborasi. Proses adaptasi ini juga terlihat dalam perubahan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik, meskipun masih terbatas pada isu-isu sosial.

Dari sudut pandang teori perubahan sosial, fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif evolusi sosial yang diajukan oleh Talcott Parsons, yang menyatakan bahwa perubahan sosial tidak selalu revolusioner, tetapi sering kali bersifat evolusioner dan berlangsung dalam waktu yang lama (Parsons, 2017). Di Maluku, adaptasi terhadap budaya patriarki ini menunjukkan bahwa perubahan dalam peran perempuan politisi tidak serta-merta terjadi secara dramatis, tetapi melalui proses yang bertahap. Namun, perubahan ini penting karena mencerminkan adanya pergeseran dalam struktur sosial

yang memungkinkan perempuan untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Modal Sosial sebagai Aset Politik yang Kuat

Temuan penelitian ini menyoroti salah satu strategi paling menonjol yang digunakan oleh perempuan politisi di Maluku, yaitu pemanfaatan modal sosial dalam bentuk jaringan kekerabatan dan hubungan adat untuk memperkuat posisi politik mereka. Modal sosial yang terjalin melalui ikatan *gandong* (persaudaraan antar-kelompok adat) dan famili (keluarga besar) memainkan peran penting dalam mendukung kampanye politik perempuan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. Perempuan politisi yang mampu mengoptimalkan jaringan sosial ini sering kali menerima dukungan yang lebih luas dari masyarakat, terutama karena ikatan adat memperkuat kepercayaan dan loyalitas di antara individu dan komunitas.

Salah satu informan politik perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa “Di sini, hubungan *gandong* sangat kuat. Kalau saya bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga-keluarga yang memiliki *gandong* dengan keluarga saya, dukungan politik akan lebih mudah didapatkan. Ini bukan sekadar dukungan politik, tapi lebih ke arah kepercayaan dan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun.”

Penegasan ini menunjukkan bahwa perempuan politisi di Maluku menggunakan modal sosial berbasis kekerabatan untuk lebih dari sekadar kepentingan politik elektoral; mereka juga memperkuat jaringan kepercayaan yang mendasari tatanan sosial komunitas adat. Hubungan-hubungan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kampanye, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian dan menyelesaikan ketegangan politik lokal. Data wawancara menunjukkan bahwa perempuan politisi sering menjadi mediator dalam konflik lokal karena mereka memiliki akses ke kelompok-kelompok adat yang lebih luas melalui jaringan kekerabatan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan ⁴³ teori modal sosial yang dikemukakan oleh Robert Putnam (1993), yang menyatakan bahwa jaringan sosial dan hubungan timbal balik yang kuat dapat menjadi aset politik yang berharga. Dalam konteks politik di Maluku, perempuan politisi memanfaatkan modal sosial berbasis adat untuk membangun

kepercayaan, solidaritas, dan dukungan politik. Hubungan *gandong* dan famili tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga menjadi sumber daya politik yang signifikan. Dengan membangun koneksi ini, perempuan politisi tidak hanya memperkuat legitimasi mereka di mata konstituen, tetapi juga mendapatkan akses yang lebih mudah ke sumber daya politik, seperti suara, dukungan finansial, dan jaringan pengaruh.

Penggunaan modal sosial ini juga dapat dilihat dari perspektif sosiologis yang diajukan oleh Coleman (1988), yang memandang modal sosial sebagai sumber daya yang terkandung dalam hubungan antar-individu dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kolektif. Di Maluku, perempuan politisi menggunakan modal sosial ini untuk mengatasi keterbatasan akses formal ke kekuasaan politik. Dengan memanfaatkan hubungan adat, mereka mendapatkan kesempatan untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam politik lokal meskipun masih berada dalam kerangka budaya patriarki yang kental.

Data juga mendukung argumen Woolcock (1998) mengenai peran modal sosial dalam pembangunan, di mana jaringan sosial yang kuat memberikan akses kepada sumber daya dan peluang yang lebih besar. Woolcock mengemukakan bahwa modal sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi lintas batas sosial, sehingga membuka pintu bagi kerjasama yang lebih luas. Dalam konteks Maluku, perempuan politisi menggunakan jaringan adat sebagai platform untuk berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, baik yang memiliki ikatan kekerabatan langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penggalangan dukungan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun komunikasi lintas kelompok dan menyelesaikan konflik.

Namun, meskipun modal sosial memberi perempuan politisi keunggulan dalam hal penggalangan dukungan dan penyelesaian konflik, mereka tetap berhadapan dengan tantangan struktural dari budaya patriarki. Modal sosial berbasis adat di Maluku masih terpengaruh oleh norma-norma patriarki yang mendikte bahwa perempuan harus menempati peran pendukung. Dalam wawancara, beberapa perempuan politisi mengakui bahwa meskipun mereka dapat memanfaatkan modal sosial untuk memperkuat posisi politik mereka, resistensi dari laki-laki politisi dan tokoh adat tetap menjadi penghalang yang signifikan.

Seorang informan perempuan politisi menggambarkan pengalamannya dalam konteks ini bahwa "Saya tahu jaringan adat sangat membantu, tapi tetap saja, banyak tokoh laki-laki yang lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun saya memiliki hubungan yang baik dengan komunitas, ada batasan dalam peran yang bisa saya mainkan karena norma-norma gender yang sudah ada sejak lama."

Pernyataan ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam penggunaan modal sosial. Di satu sisi, perempuan politisi dapat memanfaatkan jaringan kekerabatan untuk memperkuat dukungan politik mereka. Namun, di sisi lain, mereka masih harus berjuang melawan struktur patriarki yang membatasi peran mereka dalam proses pengambilan keputusan politik yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa meskipun modal sosial dapat menjadi sumber kekuatan politik, kekuatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh patriarki.

Dari perspektif sosiologi politik, pemanfaatan modal sosial oleh perempuan politisi di Maluku dapat dianalisis menggunakan pandangan Pierre Bourdieu (1986) tentang modal sosial sebagai sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh dalam struktur sosial. Bourdieu berpendapat bahwa modal sosial, yang mencakup jaringan sosial dan hubungan timbal balik, memungkinkan individu untuk memperoleh keuntungan simbolis dan material yang lebih besar dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan politisi di Maluku menggunakan modal sosial mereka untuk mendapatkan akses ke sumber daya politik yang sebelumnya sulit dijangkau.

Selain itu, teori structuration dari Giddens (2008) relevan untuk memahami bagaimana perempuan politisi menggunakan modal sosial untuk tidak hanya bekerja dalam struktur yang ada, tetapi juga secara aktif membentuk dan mengubahnya. Dengan memanfaatkan hubungan adat, mereka tidak hanya mengikuti norma-norma sosial yang ada, tetapi juga menciptakan ruang bagi perubahan, di mana perempuan dapat berperan lebih signifikan dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan politisi tidak hanya menjadi objek dari struktur sosial, tetapi juga agen aktif yang berusaha merestrukturisasi peran mereka dalam politik lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan politisi di Maluku mampu menerapkan strategi komunikasi politik yang efektif dengan memanfaatkan modal sosial berbasis nilai-nilai adat seperti *gandong* dan famili. Strategi ini memperkuat jaringan sosial dan memperluas dukungan politik, terutama dalam konteks lokal yang sangat dipengaruhi oleh budaya adat. Pendekatan komunikasi yang kolaboratif, yang lebih menekankan dialog dan harmoni daripada konfrontasi, menjadi ciri khas politisi perempuan di Maluku. Namun, budaya patriarki tetap menjadi tantangan utama yang menghambat perempuan dalam peran pengambil keputusan. Meskipun demikian, perempuan politisi secara bertahap mendobrak hambatan ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat yang progresif dan membangun kekuatan dari jaringan sosial yang mereka miliki.

Sebagai upaya lebih lanjut, diperlukan peningkatan kesadaran gender di tingkat komunitas adat dan politik, serta penguatan modal sosial melalui kolaborasi lintas kelompok. Program pendidikan politik khusus bagi perempuan di daerah pedesaan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi dinamika politik yang maskulin. Lembaga adat juga berperan penting dalam mengadvokasi kesetaraan gender dengan mereformasi nilai-nilai patriarki yang membatasi perempuan. Selain itu, penelitian lanjutan tentang adaptasi nilai-nilai adat dalam konteks patriarki bisa menjadi dasar untuk memperdalam pemahaman tentang perubahan sosial di Maluku yang lebih mendukung partisipasi perempuan dalam politik.

DAFTAR REFERENSI

- 7 Afdhal, A. (2023). Peran Perempuan dalam Perekonomian Lokal Melalui Ekowisata di Maluku: Tinjauan Sosio-Ekologi dan Sosio-Ekonomi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 208–224.
- Basu, A. (2020). The Challenge of Gender and Politics in Patriarchal Societies. *Global Gender Politics Journal*, 12(1), 34–48.
- 10 Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2016). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- 14 Cárdenas, M. L., & Hedström, J. (2021). Armed resistance and feminist activism. In *Routledge Handbook of Feminist Peace Research* (pp. 148–156). Routledge.
- 12 Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal*

- of *Sociology*, 94(Supplement), S95–S120.
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics*. Stanford University Press.
- Denton, R. E., & Woodward, G. C. (2014). *Political Communication in America*. Greenwood Publishing Group.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Sage Book.
- Farkas, X., & Bene, M. (2021). Images, politicians, and social media: Patterns and effects of politicians' image-based political communication strategies on social media. *The International Journal of Press/Politics*, 26(1), 119–142.
- Flick, U. (2014). *An Introduction to Qualitative Research* (5th (ed.)). SAGE Publications.
- Giddens, A. (2008). Strukturalisme, Post-Strukturalisme, dan Produksi Budaya. In J. Turner (Ed.), *Social Theory Today*. Pustaka Pelajar.
- Giddens, A., & Sutton, P. W. (2021). *Essential concepts in sociology*. John Wiley & Sons.
- Klinger, U., & Svensson, J. (2023). The power of code: women and the making of the digital world. In *Women in the Digital World* (pp. 84–99). Routledge.
- Knott, E., & Kostovicova, D. (2024). To Report or Not to Report on Research Ethics in Political Science and International Relations: A New Dimension of Gender-Based Inequality. *American Political Science Review*, 1–18.
- Krasniqi, E. (2021). Same goal, different paths, different class: women's feminist political engagements in Kosovo from the mid-1970s until the mid-1990s. *Comparative Southeast European Studies*, 69(2–3), 313–334.
- Krook, M. L., & Norris, P. (2014). *Gender, Politics, and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*. Palgrave Macmillan.
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3).
- McNair, B. (2011). *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. remaja rosdakarya.
- Muñoz-Puig, M. (2024). Intersectional power struggles in feminist movements: An analysis of resistance and counter-resistance to intersectionality. *Gender, Work & Organization*, 31(3), 1133–1147.
- Nazrul, N. (2024). Gendered Deification: Women Leaders and Political Iconography in Bangladesh. *International Journal of Arts and Humanities*, 2(1), 43–55.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Parsons, T. (2017). The present status of “structural-functional” theory in sociology. In *The idea of social structure* (pp. 67–84). Routledge.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.

- ³ Prillaman, S. A. (2023). Strength in numbers: how women's groups close India's political gender gap. *American Journal of Political Science*, 67(2), 390–410.
- ¹⁸ Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- ¹⁵ Ramdhan, R. M., & Afdhal, A. (2023). Women in Local Politics: The Role ²⁰ Mass Media in Ambon City. *Journal of Social, Culture, and Language*, 2(1), 10–23.
- Ross, K., & Carter, C. (2011). Women and News: A Long and Winding Road. *Political Communication*, 28(2), 125–146.
- Sapir ³¹ V. (2019). Gendered Political Communication: Exploring Patterns and Norms. *Journal of Communication*, 69(2), 134–154. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz027>
- ¹ Tondang, D., Kotarumalos, A., & Muhtar, M. (2023). Politik dan Perempuan: Kajian Kegagalan Caleg Perempuan PDIP pada Pemilu Legislatif Kota Ambon Tahun 2019. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 83–98.
- ¹ Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- ⁵ Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. *Theory and Society*, 27(2), 151–208.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th (ed.)). SAGE Publications.

Komunikasi Politik Perempuan di Maluku: Antara Peluang, Tantangan, dan Dinamika Sosial-Budaya

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	1%
2	dokumen.pub Internet Source	1%
3	ejournal.papanda.org Internet Source	1%
4	journalarticle.ukm.my Internet Source	1%
5	www-emerald-com-443.webvpn.sxu.edu.cn Internet Source	1%
6	redfame.com Internet Source	1%
7	doaj.org Internet Source	1%
8	Submitted to University of Oxford Student Paper	<1%
9	eprints.lse.ac.uk Internet Source	<1%

10	www.conftool.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to Navitas Professional Institute Pty Ltd Student Paper	<1 %
12	Younis, Hawazin. "Professional Palestinian women at the forefront of the workforce: physicians, lawyers and high-tech workers", University of Haifa (Israel), 2021 Publication	<1 %
13	easychair.org Internet Source	<1 %
14	Submitted to University of Northumbria at Newcastle Student Paper	<1 %
15	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
17	core.ac.uk Internet Source	<1 %
18	epapanis.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Student Paper	<1 %

20	journal.comm.or.kr Internet Source	<1 %
21	www.journalofmedula.com Internet Source	<1 %
22	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universiti Brunei Darussalam Student Paper	<1 %
24	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
25	research.stmarys.ac.uk Internet Source	<1 %
26	Rosi Fitriasia, Nurmadiyah Nurmadiyah. "Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning dalam Pendidikan Agama Islam Siswa SMAN 10 Batanghari", ISLAMIKA, 2024 Publication	<1 %
27	d.docksci.com Internet Source	<1 %
28	fpik.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
29	bibdorm.bsb-muenchen.de Internet Source	<1 %

30 do Adro, Natacha Morgado Achando. "As Maes Adolescentes de Classes Populares e a Utilizacao das Redes Sociais na Obtencao de Informacao Politica", ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa (Portugal), 2022
Publication <1 %

31 ejournal.upnvj.ac.id
Internet Source <1 %

32 fenix-mais.iscte-iul.pt
Internet Source <1 %

33 www.iprjb.org
Internet Source <1 %

34 www.scilit.net
Internet Source <1 %

35 www.sheffield.ac.uk
Internet Source <1 %

36 Monalisa Lamatokang, Rugayah Alhamid, Julia Theresia Patty. "ANALYSIS OF SCHOOL-BASED MANAGEMENT AT MTS OF BALPETU VILLAGE, KEPALA MADAN DISTRICT, SOUTH BURU REGENCY", PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2024
Publication <1 %

37 e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id
Internet Source <1 %

gudangilmudansoal820.blogspot.com

38	Internet Source	<1 %
39	jurnal.umj.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.untar.ac.id Internet Source	<1 %
41	Submitted to University of Southampton Student Paper	<1 %
42	indonesia.unfpa.org Internet Source	<1 %
43	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
44	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
45	quranhadisfitri.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	repository.penerbitwidina.com Internet Source	<1 %
47	womeninbuddhismtour-india.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	Caitlin McMullin. "Co-production and the third sector: A comparative study of England and France", Thesis Commons, 2018 Publication	<1 %

49

Massuhartono Massuhartono.
"HETERONORMATIVITAS DAN
PERKEMBANGAN IDENTITAS SEKSUAL ANAK
REMAJA", Harakat an-Nisa: Jurnal Studi
Gender dan Anak, 2024

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off